

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 telah memicu lonjakan penetrasi internet di Indonesia, mencapai 79,5% pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini disertai dengan masalah pemasangan tiang Wi-Fi yang seringkali ilegal dan tidak teratur, terutama di Kabupaten Jombang. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis ini meneliti dampak pemasangan tiang Wi-Fi ilegal terhadap tata ruang dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan yang tidak teratur menyebabkan gangguan estetika lingkungan, bahaya keselamatan, dan konflik sosial.

Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemasangan tiang Wi-Fi ilegal terhadap tata ruang dan masyarakat di Kabupaten Jombang, dengan fokus pada urgensi peraturan yang mengatur pemasangan tiang Wi-Fi demi menjaga tata ruang dan keselamatan umum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan pihak berwenang, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet.

Pengaturan tata ruang pemasangan tiang Wi-Fi di Jombang diatur oleh Perda dan Perbup, yang mewajibkan izin dari Bupati dan mengatur pemanfaatan ruang publik. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, termasuk masalah perizinan yang rumit, protes masyarakat, kurangnya ketegasan pemerintah, dan pemahaman hukum yang minim. Selain itu, tumpang tindih peraturan, belum terbentuknya tim pengawasan yang efektif, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait semakin mempersulit penegakan hukum. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, yang menghambat terciptanya pemasangan tiang Wi-Fi yang tertib dan sesuai standar di Kabupaten Jombang.

Kata Kunci : Tata Ruang, Dampak Pemasangan Tiang *Wi-Fi*, Kabupaten Jombang

ABSTRACT

The Industrial Revolution 4.0 has triggered a surge in internet penetration in Indonesia, reaching 79.5% in 2024. However, this increase is accompanied by problems with Wi-Fi pole installations that are often illegal and unregulated, especially in Jombang Regency. This empirical juridical research with a sociological approach examines the impact of illegal Wi-Fi pole installations on spatial planning and society. The research results show that unregulated installations cause environmental aesthetic disturbances, safety hazards, and social conflicts.

This empirical juridical research with a sociological approach aims to analyze the impact of illegal Wi-Fi pole installation on spatial planning and society in Jombang Regency, focusing on the urgency of regulations governing Wi-Fi pole installation to maintain spatial order and public safety. This research uses primary data obtained from interviews with the community and authorities, as well as secondary data in the form of legislation and other legal materials, collected through literature review and internet research.

The spatial planning regulation for Wi-Fi pole installations in Jombang is governed by Regional Regulations (Perda) and Regent Regulations (Perbup), which require permits from the Regent and regulate the use of public spaces. However, its implementation faces various obstacles, including complex licensing issues, public protests, lack of government firmness, and minimal legal understanding. Additionally, regulatory overlaps, the absence of an effective oversight team, and lack of coordination between related agencies further complicate law enforcement. Consequently, there is a gap between policy and implementation, which hinders the creation of orderly and standardized Wi-Fi pole installations in Jombang Regency.

Keyword : *Spatial Planning, Impact of Wi-Fi Pole Installation, Jombang Regency*